

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Menurut Shirazi dan Pramanik Kemiskinan merupakan fenomena yang sering dijumpai di semua negara tidak terkecuali di Indonesia. Dimana kondisi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan taraf hidup di lingkungannya. Mendefinisikan kemiskinan ialah ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup minimum dimana pengukurannya didasarkan pada konsumsi. Hidup dalam ruang kemiskinan tidak hanya hidup dalam kekurangan pendapatan, tetapi ada hal lainnya seperti tingkat pendidikan yang minim, kesehatan, keadilan serta tidak sanggup dalam menentukan arah kehidupannya.

Menurut (Arsyad, 2004:238), Kemiskinan di definisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standart hidup minimum. Dimana kemiskinan dikaitkan dengan standart hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya ditinjau dari dua sisi, yaitu: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini didefinisikan jumlah penduduk yang hidup digaris bawah kemiskinan tertentu. Atau seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan, atau dengan kata lain kemiskinan relatif sangat erat kaitan dengan masalah distribusi pendapatan. Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standart minimum dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Badan pusat statistik menggunakan indikator atau Patokan yang mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi. Dimana kemiskinan yang terdiri dari memenuhi standart kebutuhan makanan atau disebut Garis Kemiskinan Makanan (GKM), GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Dan memenuhi

standart kebutuhan non makanan yaitu Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), GNKM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada berdasarkan norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan konsumsi (consumption- based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu: Pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standart gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan konsep ini menurut (Arsyad, 2004:239), garis kemiskinan akan mengalami perubahan atau telah berkembang dan sangat bervariasi, bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

- a) Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
- b) Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (leisure), dan rekreasi serta ketenangan hidup
- c) Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). Kemiskinan relatif merupakan ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya terkait dengan ukuran dibawah tingkat rata-rata distribusi pendapatan nasional. Penanggulangan kemiskinan yang meluas merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan sesungguhnya bagi banyak orang merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan.

2.1.1.1. Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan ada 2 yaitu Menurut (Kuncoro, 2006).

1. Garis kemiskinan BPS, hal ini terjadi karena lokasi dan kebutuhan hidup yang berbedabeda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan.
2. Garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan versi professor Sajogyo, dengan menggunakan garis kemiskinan atas dasar harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras.

ada tiga indikator yang diperkenalkan untuk mengukur kemiskinan, Menurut Foster dkk, antara lain:

- a. The incidence of poverty yaitu persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan.
- b. The depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan Poverty Gap Index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
- c. The severity of poverty yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan distributionally sensitive index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

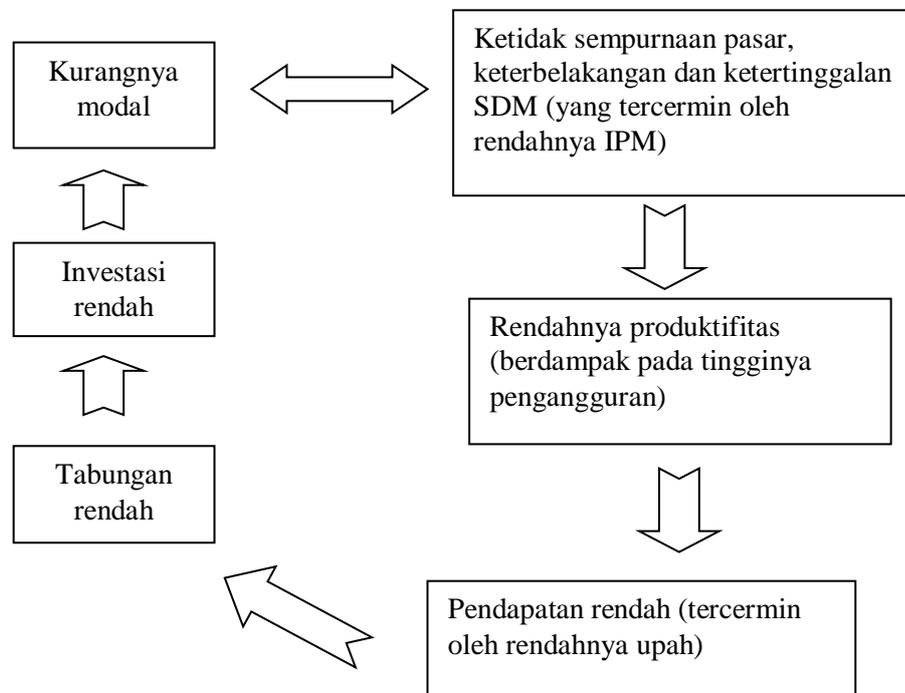
2.1.1.2. Penyebab Kemiskinan

Terdapat tiga penyebab terjadinya kemiskinan yaitu kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang yang menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga memicu timbulnya kemiskinan yang mempengaruhi minimnya produktivitas masyarakat, Serta kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2010).

2.1.1.3. Teori Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan ini bermula dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut atau pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circke of poverty*), yang dimana menurut Nurkse penyebab kemiskinan adalah adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada Rendahnya investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah.

Gambar 2.1.
Teori Lingkaran Kemiskinan



Teori tersebut yang mengemukakan tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan, “*A poor country is because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Hal tersebut, dimana negara memiliki produktivitas yang rendah, maka rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya tabungan maka investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, dan berputar.

2.1.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, Indeks Pembangunan rendah, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Oleh sebab itu diharapkan suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang tinggi seharusnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan kata lain jika tingkat IPM tinggi, pastinya tingkat kemiskinan juga rendah.

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang

besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

2.1.2. Pengangguran

Menurut (Sumarsono, 2009:259) Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.

Terdapat dua cara dalam menggolongkan pengangguran, yaitu berdasarkan penyebab dan berdasarkan cirinya.

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya.

1) Pengangguran Normal / Friksional

Pengangguran yang disebabkan bukan karena tidak mendapat pekerjaan tetapi pekerja sedang mencari pekerjaan yang lebih baik.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang disebabkan karena pengurangan dalam permintaan

agregat yang mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja sehingga pengangguran bertambah.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian. Perubahan dalam struktur ini memerlukan perubahan keterampilan tenaga kerja sedangkan tenaga kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena tergantinya tenaga manusia menjadi penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Perubahan ini menyebabkan pekerja diganti dengan teknologi yang diterapkan.

b. Bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi akibat dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah pekerja. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari menurunnya kegiatan ekonomi atau majunya teknologi yang menggantikan tenaga kerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terjadi karena kelebihan tenaga kerja dari yang digunakan pada yang sebenarnya dibutuhkan.

3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan cuaca. Seperti nelayan yang tidak bisa bekerja saat hujan dan terpaksa menganggur.

4) Setengah Menganggur

Pengangguran ini terjadi karena mereka bekerja dengan waktu yang lebih pendek dari waktu normal. Pekerja ini mungkin bekerja pada waktu satu sampai dua hari dalam seminggu.

2.1.2.1. Teori Pengangguran

1. Teori Keynesian

Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pekerja semata-mata ditentukan oleh aspek perusahaan dengan tingkat upah masa lalu yang given. Artinya teori ini banyak melandasi pemikiran tenaga kerja Keynesian. Menurut teori *excess supply* dan demand akan tetap ada, karena pengurangan pengangguran semata-mata ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. perusahaan akan memberikan tingkat upah sesuai dengan *Margin Revenue Product Of Labor* (MRPL) atau Produk Pendapatan Margin Dari Tenaga Kerja (tingkat upah).

2. Teori Lewis

Teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Akan kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerjaan tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk akumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerjaan dari subsisten ke sektor kapitalis modern berlanjar dan perpindahan tersebut tidak akan berpindah menjadi “terlalu banyak”.

3. Teori Fei-Ranis

Dalam teori Fei-Ranis mengemukakan bahwa Negara berkembang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak disektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dari kedua teori Lewis dan Fei-Ranis yang menyatakan bahwa teori pengangguran yang tertera pada teori ketengakerjaan yang menyatakan, salah satu masalah yang muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supplay for labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut lebih besar penawarannya dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supplay of labor*) dan lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara termasuk dalam kategori negara maju negara berkembang maupun negara terbelakang . Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur suatu daerah dalam melihat seberapa tingkat pembangunan manusia tersebut. Tiga dimensi pembangunan mencakup aspek kebutuhan panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapat pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan standart hidup. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh dalam aspek penurunan jumlah penduduk miskin.

(Napitupulu, 2007 dalam Saputra, 2011)

Indeks pembangunan manusia yaitu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa aspek dasar kualitas hidup yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011 dalam Arizal, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara yang meliputi tiga hal dasar yaitu: 1) Lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, 2) Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas dan 3) Standar hidup yang diukur dengan konsumsi perkapita. Nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0-100. Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tipe dimensi tentang pembangunan manusia : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, menengah dan ke jenjang perguruan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur melalui paritas daya beli/penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, baik dari segi akibatnya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) ataupun dari segi non fisik (intelektualitas). Pembangunan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia terlihat dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan dalam kondisi non fisik tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang tinggi seharusnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan kata lain jika tingkat IPM tinggi, pastinya tingkat kemiskinan juga rendah.

2.1.3.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pendidikan (IP)

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan engan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan menunjukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program mortpak. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau *Purching Power Parity* (PPP) adalah suatu indikator yang dipakai untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam mengukur indeks Pembangunan Manusia. Kemampuan daya beli ini lebih menggambarkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang disebut dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB perkapita tidak bisa digunakan karena tidak tepat untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Oleh karena itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang akan disesuaikan. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan.

Adapun rumus umum yang sering digunakan secara umum antara lain:

$$\text{IPM} = 1/2(\text{X1}+\text{X2}+\text{X3})\dots\dots\dots(1)$$

keterangan:

X1= Indeks Pendidikan

X2= Indeks Harapan Hidup

X3 = Indeks Daya Beli

Menurut (Kuncoro, 2010) indeks pembangunan manusia berguna untuk membandingkan kualitas pembangunan manusia baik antar daerah maupun negara. IPM digunakan untuk mengetahui apakah penduduk suatu wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, produktifitas masyarakat akan naik sehingga akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya. Jika pengeluaran konsumsi meningkat maka tingkat kemiskinan akan turun.

2.1.4. Upah Minimum

Upah Minimum adalah penerimaan bulanan (terendah) yang didapatkan oleh pekerja sebagai imbalan dari perusahaan atau pengusaha dalam bentuk uang yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian, kesepakatan atau perundang undangan atas jasa atau pekerjaan yang telah di lakukan pekerja. Upah yang layak adalah upah yang ditetapkan pemerintah yang memenuhi standar pengupahan. Tenaga kerja yang mendapatkan upah yang layak maka akan tercukupi kebutuhan hidup dalam keluarganya. Tujuan utama ditetapkannya upah adalah untuk memenuhi

kebutuhan standart hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi maupun kesejahteraan pekerja (Sumarsono, 2009:151)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi (Purnomo, 2016:183)

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, Sektoral Regional maupun Subsektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan (Sumarsono, 2009:181)

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang di berikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karywaan itu sendiri maupun untuk keluarga. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Sumarsono, 2003).

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah sebagai berikut:

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah. Tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

b. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

c. Kemampuan untuk membayar pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

d. Produktifitas Kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang akan mereka terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya Hidup

Di kota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayar.

2.1.4.1. Teori Upah Minimum

Teori Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas merupakan ajaran Karl Max menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Implikasi dari pandangan ini adalah :

- a. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
- b. Jumlah jam kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah hampir sama. Oleh sebab itu harganya di beberapa tempat hampir sama.
- c. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh (pekerja) yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

Sistem pengupahan menurut teori Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan azas pertentangan kelas. Pada dasarnya pendapat Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan pendapat lain dari teori Karl Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu

berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya adalah adanya pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah (Sumarsono, 2009:149)

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 01/men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro.

1. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu:
 - a. Sebagai jaringan pengaman agar upah tidak merosot.
 - b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan
 - c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

2. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk
 - a. Pemerataan pendapatan,
 - b. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja,
 - c. Perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional,
 - d. Peningkatan etos dan disiplin kerja, dan mempelancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan *Bipartite*.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah diseluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral yaitu:

1. Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Upah minimum adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah minimum pada dasarnya merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub

sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. (Sumarsono, 2003)

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu Provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

2.2. Teori Hubungan

2.2.1. Hubungan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Efek dari pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai. Sehingga turunya kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh masyarakat menganggur maka peluang masuk dalam kemiskinan semakin besar karena tidak mendapat penghasilan. Dengan demikian minimnya pendapatan akan meningkatkan angka kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat masalah jika beranggapan semua orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah orang miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini dikarenakan ada pekerja di kota yang mencari pekerjaan yang lebih baik

sesuai skill dan pendidikannya. (Sukirno dalam Prastyo 2010).

Menurut (Sadono Sukirno, 2016:331), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah di capai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Indeks pembangunan manusia memiliki peran dalam mengurangi angka penduduk miskin. Terdapat tiga aspek penting dalam pembangunan antara lain kebutuhan akan hidup, panjang umur dan hidup sehat, mendapatkan pengetahuan serta memiliki akses kepada sumber daya agar tercapai untuk memenuhi standar hidup. bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan itu sendiri. Pembangunan manusia berperan dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan terus dikembangkan agar tercipta pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan Menurut (Sjafi'i, 2009 dalam saparuddin, 2019).

Indeks pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan aspek yang saling berkaitan dimana jika semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka kemiskinan disuatu daerah akan menurun dan jika semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka kemiskinan di suatu daerah akan tinggi. Indeks

Pembangunan Manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas masyarakat yang berdampak pada pendapatan. Sehingga rendahnya pendapatan akan menyebabkan naiknya tingkat penduduk miskin.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tujuan utama ditetapkan Upah Minimum adalah untuk memenuhi kebutuhan standar hidup serta mengangkat derajat pekerja berpendapatan rendah. Semakin tinggi tingkat upah minimum di suatu wilayah maka pendapatan akan meningkat sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat yang akan mengurangi pengangguran sehingga membebaskan mereka dari kemiskinan (Kaufman, 2000 dalam Khabhibi, 2013:49).

Upah merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran dan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Upah juga merupakan kompesasi yang diberikan atau dibayarkan kepada pekerja. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum (Sumarsono, 2009:151).

2.3. Penelitian Terdahulu

Prastyo, (2010) meneliti tentang “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di jawa tengah periode 2003 – 2007)”. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan menggunakan pendekatan *fixed effect model* dan menggunakan jenis data

sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Saputra, (2011) meneliti tentang “ Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*ordinary least squares regression analysis*) dengan menggunakan data panel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Cholili, (2014) meneliti tentang” Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin”. Hasil penelitian ini pengangguran berpengaruh positif signifikan. Pdrb berpengaruh negatif dan tidak signifikan, indeks pembangunan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Woyanti, (2013) meneliti Tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ump Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi

Fiskal”. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan, desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan Dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Saparuddin, (2019) meneliti tentang “ Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2011 – 2014”. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

Achmad Habibi, (2013) meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011)” memperoleh hasil bahwa upah dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Oktaviana dkk, (2021) Melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran, terhadap kemiskinan di kabupaten madiun. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang merupakan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti melalui badan pusat statistik jawa timur dan madiun. Dengan mengadopsi metode

pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda dengan model *Ordinary Least Square* (OLS), penelitian ini mampu memperlihatkan adanya peningkatan ekonomi serta upah minimum kabupaten, sehingga variabel pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di kabupaten madiun dinilai memiliki pengaruh yang bernilai negatif dan signifikan. Akan tetapi variabel pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten madiun tidak kalah berpengaruh secara signifikan.

Kristanto dkk, (2014) Melakukan penelitian tentang Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten brebes tahun 1997-2012. Penelitian ini memanfaatkan penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan juga jurnal pendukung penelitian. Metode regresi yang digunakan adalah metode regresi linier berganda (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten brebes selama periode 1997-2012, akan tetapi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten brebes selama periode tahun 1997-2012.

Chisti, (2018) melakukan penelitian tentang Indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus pada 6 provinsi di pulau jawa). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda pada data panel. Hasil dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 4 variabel yang

berpengaruh signifikan tetapi 3 variabel berpengaruh secara tidak langsung. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode *D=Fixed Effect Model* (FEM) tingkat kemiskinan pada 6 provinsi di pulau jawa dipengaruhi secara langsung oleh indeks pembangunan manusia karena bernilai negatif, sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka yang bernilai negatif, pertumbuhan ekonomi bernilai positif, dan upah minimum provinsi yang juga bernilai positif.

Nursiah dkk, (2021) Melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan yaitu data panel. Hasil penelitian menunjukkan model terestimasi terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji pengaruh (uji) secara cross section menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di karesidenan Surakarta tahun 2015-2019. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh.

Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, (2011) "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia terhadap Angka kemiskinan di Indonesia". Dengan hasil bahwa secara simultan Produk Domestik Bruto (PDB), dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial produk domestik bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan α 20% dan Indeks Pembangunan

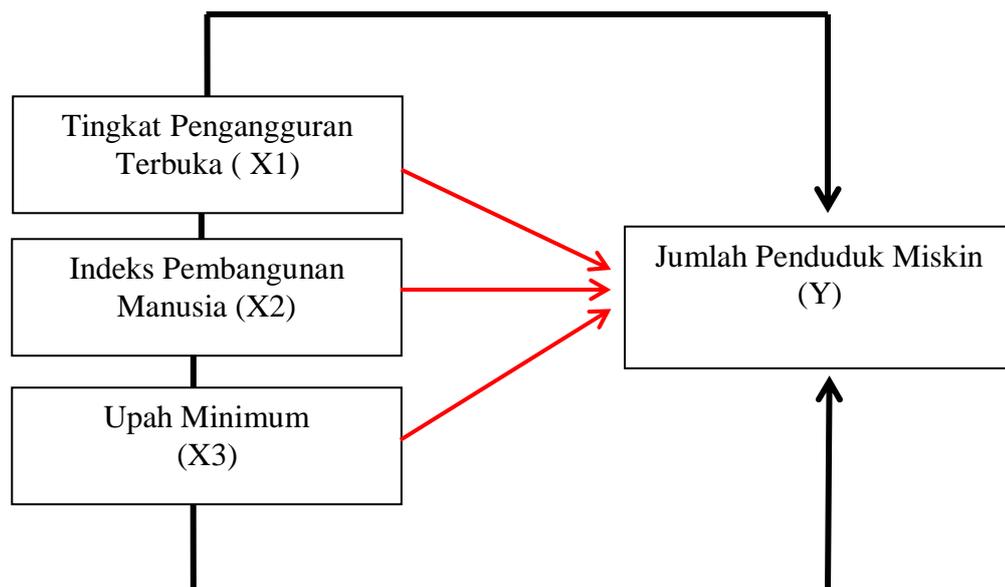
Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan α 5%.

Adapun relevansi atau keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya. Pengembangan terletak pada variabel tingkat pengangguran terbuka (X1), indeks pembangunan manusia (X2), upah minimum (X3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y).

2.4. Kerangka Pikir

Berikut gambaran kerangka pikir variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dibawah ini.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Analisis



Keterangan :

Secara parsial 

Secara simultan 

2.5. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang harus di uji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diperkuat dengan tinjauan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Upah Minimum (X3) berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Indonesia Tahun 2002 – 2021.